

**MANAJEMEN PERKOTAAN  
(STUDI KASUS PENATAAN DRAINASE DI KOTA PEKANBARU)**

**Ahmad Fawahid**

Email : [achmadfawahid@ymail.com](mailto:achmadfawahid@ymail.com)

**Pembimbing** : Dadang Mashur, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-  
Telp/Fax. 0761-63277

**Abstract**

*The system to distribute rain called drainage. This system plays an important function to create a healthy environment and reduces the overbalance of water. The capacity of drainage is smaller than seedlings flood and it makes confusion of water from the canal because the drainage was stepped up and unequal structuring construction of drainage. Based on Ministry of Public Works of Indonesian Republic No.12/2014 about the implementation of drainage of urban system. The purpose of this study is to identify the drainage structuring management in Pekanbaru, Riau. The writer uses the theory from Prajudi Atmosudirdjo on M. Manulang which explains about drainage structuring management, it includes planning, organizing, directing and controlling. This study used descriptive qualitative method. In collecting the data, the writer was used interview, observation, and documentation. The finding of this study shows that the urban management of drainage arrangement in Pekanbaru city has gone well, it can be seen from the planning, directing, and controlling system. Due to some factors which influence sustainability of governments' work in handling the drainage problem, it makes the result of the governments' effort was not going well and still going flood when it rain.*

**Keyword** : *Urban Management, Structuring Drainage, in the public works department of housing, settlements and copyrights of pekanbaru city.*

## PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pembangunan yang memiliki aspek penting dan vital untuk mempercepat suatu proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peran penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Infrastruktur adalah sarana yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat dan memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi, sosial budaya dan kesatuan yang mengikat dan menghubungkan antara daerah dengan daerah lainnya. Pembangunan infrastruktur mempunyai peran dalam mewujudkan hak pada rakyat seperti, pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Infrastruktur pusat adalah infrastruktur yang dibangun pemerintah pusat untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam skala nasional, sehingga salah satu pembangunan yang dibutuhkan seperti penataan drainase.

Undang – undang No 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa Kota merupakan tempat bagi banyak orang untuk melakukan berbagai aktivitas, maka untuk menjamin kesehatan dan kenyamanan penduduknya harus ada sanitasi yang memadai, misalnya drainase. Dengan adanya drainase tersebut genangan air hujan dapat disalurkan sehingga banjir dapat dihindari dan tidak akan menimbulkan dampak gangguan kesehatan pada masyarakat serta aktivitas masyarakat tidak akan terganggu.

Kota Pekanbaru terkenal sebagai pusat pemerintahan di

Provinsi Riau, pusat perdagangan, serta pusat pelayanan jasa baik skala lokal maupun regional, oleh karenanya perkembangan Kota Pekanbaru segera akan menjadi salah satu kota yang cukup strategis dari sudut pandang ekonomi sehingga aktifitas pergerakan pola aliran barang jasa baik dari dalam kota sampai luar kota volumenya semakin meningkat.

Pesatnya pembangunan di kota Pekanbaru ini belum diimbangi oleh pembangunan fasilitas pendukung yang memadai, dalam penyediaan jaringan drainase. Saat terjadinya musim hujan Limpahan air hujan dari kawasan permukiman dan badan jalan tidak dapat dialirkan dengan lancar, sehingga genangan air setiap tahunnya tinggi dan lama-kelamaan genangan air hujan semakin bertambah.

Permasalahan banjir atau genangan air di Kota Pekanbaru sampai saat ini merupakan masalah yang cukup serius karena akan mempengaruhi kehidupan kota baik dari segi sosial ekonomi maupun budaya. Kota Pekanbaru sampai saat ini masih sering dilanda banjir serta mengalami genangan yang cukup luas dan lama di setiap musim hujan maka di perlukan penataan drainase yang lebih baik lagi sehingga bisa mencegah terjadinya banjir.

Dari kondisi yang ada pada saat ini, kondisi jaringan drainase di Kota Pekanbaru belum cukup tersedia dan memadai baik pada ruas jalan utama di kota maupun di unit lingkungan permukiman. Kenyataan di lapangan terjadi banjir/genangan air di beberapa lokasi yang cukup luas, hal ini menunjukkan bahwa sistem

jaringan drainase di Kota Pekanbaru masih belum tersedia dan berfungsi secara maksimal.

Banyaknya daerah/lokasi ruas jalan dan lingkungan permukiman yang mengalami banjir/tergenang air hujan karena Kapasitas saluran air lebih kecil dari bibit banjir yang terjadi sehingga melimpahnya air dari seluran karena adanya penyempitan salura air yang terjadi di Kota Pekanbaru merupakan masalah yang sampai saat ini belum dapat teratasi secara maksimal dan tetap menjadi pemikiran untuk penanggulangannya.

Permasalahan banjir tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain:

1. Secara fisik alami jenis tanah di Kota Pekanbaru adalah jenis tanah sendimentasi yang mempunyai daya resapan air rendah.
2. Geomorfologi dataran Pekanbaru yang merupakan delta hasil endapan tanah alluvial yang sangat rata dan pada beberapa lokasi menyulitkan aliran air secara gravitasi.
3. Kurangnya pemeliharaan drainase yang ada oleh dinas terkait maupun rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga kondisi drainase dilingkungannya.
4. Perkembangan kota yang mulai terjadi menyebabkan perubahan fungsi tata guna lahan dari daerah tak terbangun (tanah kosong) menjadi daerah terbangun (menjadi bangunan gedung, perumahan, jalan dan fasilitas fisik lainnya), sehingga daerah resapan air permukaan dan daerah tampungan air sementara semakin berkurang.

5. Meningkatnya pembangunan infrastruktur perkotaan tidak diimbangi dengan pembangunan saluran pembuang (drainase) yang sesuai dengan standar teknis yang telah ditentukan.

6. Belum adanya suatu perencanaan drainase yang komprehensif yang dapat dijadikan dasar pembangunan saluran drainase dan bangunan-bangunan pendukung lainnya di kota Pekanbaru.

Permasalahan penataan drainase di Wilayah kota pekanbaru pada umumnya tidak terlepas dari system pengelolaan drainase. Akumidasi sampah dan sedimentasi serta perubahan fimgsi latum dari dari hutan menjadi kawasan permukiman dan industri menyebabkan kapasitas saluran drainase yang ada tidak dapat lagi menampung lagi limpasan air hujan dan buangan kegiatan rumah tangga. Permasalahan tersebut pada hakekatnya berakar pada aspek teknis yang tidak memadai, organisasi/lembaga yang lemah, flnansial yang tidak cukup dan kewenangnya peran serta masyarakat dalam penataan drainase.

Berdasarkan dari uraian yang dituangkan dalam latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen perkotaan (Studi Kasus Penataan Drainse di Kota Pekanbaru)?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen perkotaan (Studi Kasus Penataan Drainase di Kota Pekanbaru)?

Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana manajemen perkotaan (Studi Kasus

Penataan Drainase di Kota Pekanbaru) serta untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

## KONSEP TEORI

Dalam rangka teori ini penulis akan mengemukakan beberapa teori yang mendukung permasalahan yang akan dibahas. **G.R Terry (2006:4)** mendefinisikan manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. yang dilakukan untuk menentukan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya

Manajemen menurut **Abdurrahmat Fathonin (2006 : 27)** adalah proses yang khas terdiri dari tindakan – tindakan yang dimulai dari penentuan tujuan sampai pengawasan dimasing- masing bidang digunakan baik itu ilmu pengetahuan maupun keahlian yang diikuti serta berurutan dalam rangka berusaha mencapai sasaran yang ditetapkan semula.

**John D. Millet** dalam **Inu Kencana Syafii (2004:101)** juga menyatakan bahwa manajemen adalah proses kepemimpinan dan pemberian arah terhadap pekerjaan yang terorganisir dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Menurut **Siswanto (2005:7)** mengatakan manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang di sistematiskan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat di simpulkan manajemen adalah suatu ilmu dan

seni yang dibutuhkan dalam proses kegiatan pencapaian tujuan dengan menggunakan kegiatan orang lain. Dengan demikian manajemen adalah proses kegiatan yang harus dilakukan dalam suatu organisasi.

Menurut **Prajudi Atmolah sudirdjo dalam (M.Manulang 2012 : 3)** fungsi manajemen meliputi :

1. *Perencanaan* adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan oleh karenanya lebih tepat bila perencanaan di rumuskan sebagai penetapan tujuan, kebijakan, prosedur dan program dari suatu organisasi.
2. *Pengorganisasian* dapat pula dirumuskan sebagai keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan terciptanya aktivitas-aktivitas yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu.
3. *Directing* adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan,saran,perintah-perintah atau intruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.
4. *Pengawasan*, dalam pelaksanaan tugas pengawasan untuk mempermudah pelaksanaan dalam merealisasi tujuan harus pula dilalui beberapa fase atau urutan pelaksanaan. Proses pengawasan dimanapun juga atau

pengawasan yang berobjektifkan apapun terdiri dari fase sebagai berikut : menetapkan alat pengukur ( standar), mengandalkan penilaian ( evaluation ), mengadakan tindakan perbaikan ( coorective action)

Kota menurut **Alan S. Burger** “The City” yang diterjemahkan oleh Dyayadi dalam bukunya Tata Kota menurut Islam adalah suatu permukiman yang menetap (permanen) dengan penduduk yang heterogen, dimana di kota itu dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang terintegrasi membentuk suatu sistem sosial dan seterusnya.

Menurut **Prof. Bintarto (1983)** dari segi geografis kota diartikan sebagai suatu sistim jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata ekonomi yang heterogen dan bercorak materialistis atau dapat pula diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah dibelakangnya.

Menurut **John Brickerhoff Jackson (1984)** kota adalah suatu tempat tinggal manusia yang merupakan manifestasi dari perencanaan dan perancangan yang dipenuhi oleh berbagi unsur seperti bangunan, jalan dan ruang terbuka hijau.

Kota dalam pengertian administrasi pemerintah diartikan suatu bentuk pemerintahan daerah

yang mayoritas wilayahnya merupakan daerah perkotaan. Wilayah kota secara administratif tidak selalu semuanya berupa daerah terbangun perkotaan (*urban*), tetapi umumnya juga masih mempunyai bagian wilayah yang berciri pedesaan (*rural*).

Menurut Surat Keputusan Mentri dalam neggri No. 65 tahun 1995. Manajemen perkotaan adalah pengelolaan sumber daya perkotaan yang berkaitan dengan bidang-bidang tata ruang, lahan, ekonomi, keuangan, lingkungan hidup, pelayanan jasa, investasi, prasarana dan sarana perkotaan; serta di sebutkan pula bahwa pengelola perkotaan adalah para pejabat (Pemerintah) pengelola perkotaan. Dengan demikian, menurut apa yang secara formal didefinisikan oleh Pemerintah, manajemen perkotaan meliputi hal yang cukup luas, dan Nampak menekankan pada aspek perkembangan kota dan perkembangan ekonomi kota.

Manajemen perkotaan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan suatu proses manajemen, yaitu mengorganisasikan dan mengkoordinasikan kondisi atau sistem kota yang ada saat ini yaitu faktor-faktor produksi di dalam kota baik yang berupa tanah, tenaga kerja, modal maupun kewiraswastaan, supaya dapat dicapai hasil yang maksimal dan efisien untuk menuju ke arah sistem kota yang dikehendaki berdasarkan pada tujuan idela dan dinamis.

Manajemen perkotaan menurut **Richard E. Stren**, mencakup :

1. Proyek pembangunan perkotaan dalam konteks wilayah kota dan pertimbangan kelembagaan.

2. Memusatkan perhatian pada sumber daya keuangan local untuk memperkuat desentralisasi
3. Memusatkan perhatian pada berbagai alternatif untuk mengorganisir dan membiayai pelayanan kota seperti : air bersih, transportasi, listrik sampah, kesehatan, dan lain-lain.
4. Perhatian untuk mencari dan mempromosikan partisipasi masyarakat dalam pelayanan infrastruktur kota.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah diskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. penelitian diskriptif yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subjek, baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya, serta didasarkan atas hasil observasi yang dilaksanakan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan di lapangan dan dihubungkan dengan konsep teori, yaitu tentang manajemen perkotaan studi kasus penataan drainase di Kota Pekanbaru.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Cipta Karya Kota Pekanbaru. Pemilihan lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penyelenggaraan sistem drainase perkotaan di kota Pekanbaru.

Informan penelitian yaitu subjek atau seseorang yang mempunyai pengetahuan (informasi) tentang objek (sasaran) penelitian, yang lazimnya berkaitan dengan sifat

atau keadaan kelembagaan, masyarakat. Informan penelitian menggunakan metode *Snowball Sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. *Key informan* adalah Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Cipta Karya, informan lainnya adalah Bidang Perencanaan dan Pengawasan, Seksi perencanaan teknis, Seksi Evaluasi, Monitoring dan Plaporan.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

### a. Data Primer

Data primer ini yaitu data mengenai tentang manajemen perkotaan yang diperoleh secara langsung dari informen. Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dan observasi langsung mengenai tentang manajemen perkotaan di kota Pekanbaru.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peneliti dari berbagai sumber yang telah ada yang dapat menunjukkan objek yang diteliti berupa:

1. keadaan geografis di provinsi Riau
2. struktur dinas perumahan, pemukiman, dan cipta karya kota Pekanbaru
3. literatur – literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, skripsi, dan tesis serta informasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

Metode pengambilan data adalah tatancara atau teknik pencarian data, baik yang berasal dari objek penelitian. untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara, yaitu;

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada informen yang berhubungan dengan penelitian, baik secara struktur maupun tidak terstruktur guna untuk mendapat informasi yang di inginkan oleh peneliti.

### 2. Obsarvarsi

Peneliti mengamati lapangan, yaitu turun secara langsung kelapangan untuk mengetahui atau mengamati gejala-gejala apa yang terjadi dilapangan.

### 3. Dokumentasi

Merupakan studi yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui catatan, arsip yang ada pada kantor dinas perumahan, pemukiman, dan cipta karya kota pekanbaru. Guna untuk mendapatkan informasi untuk hasil penelitian penulis. Dokumentasi dilakukan dengan pihak Dinas Perumahan Permukiman dan Cipta Karya Kota Pekanbaru.

Dalam menganalisi data yang peneliti peroleh data primer maupun data sekunder, peneliti menggunakan teknik diskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengklafikasikan, menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengn masalah kemudian mearik kesimpulan untuk menentukan hasil berdasarkan hasil penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan terdapat empat fungsi manajemen

perkotaan menurut **Prajudi Atmolah Sudirdjo**, yaitu

### 1. Perencanaan

Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tidak akan dapat berjalan.

Perencanaan yang dilakukan oleh dinas Perumahan Permukiman dan Cipta Karya sebagai dasar dalam melaksanakan sebuah pembangunan penataan drainase di Pekanbaru. Kemampuan dalam melakukan sebuah perencanaan pada awal tidak terlepas dari pengetahuan dan keahlian pengelola program itu sendiri mengenai tujuan dan sasaran yang akan diperoleh. Sebab perencanaan pada awal akan memberikan kontribusi sangat penting yang positif bagi pengelola dalam mewujudkan visi dan misi tersebut.

#### a. Penetapan tujuan

Didalam penetapan tujuan perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Cipta Karya Kota Pekanbaru. Tujuan yang ingin dicapai dari rencana kerja adalah untuk mencegah terjadinya banjir yang sering terjadi di kota pekanbaru dan tujuan dari penataan drainase itu sendiri yaitu supaya untuk menghiindari kerusakan material dan memperbaiki kualitas lingkungan, tetapi dilapangan masih terjadinya hambatan dalam proses pembangunan.

b. Kebijakan

Untuk membangun pembangunan yang baik maka di perlukan suatu kebijakan dalam perencanaan pembangunan sehingga ada peraturan atau pedoman yang digariskan bagi tindakan dinas untuk mencapai tujuan hasil yang baik.

Dinas perumahan permukiman dan Cipta Karya belum bekerja sepenuhnya setiap tahunnya karena terkendala oleh kebijakan master plan untuk seluruh kota pekanbaru. Namun, itu tidak menjadi hambatan bagi dinas Perumahan Permukiman dan Cipta Karya untuk bekerja, mereka tetap bekerja setiap tahunnya sesuai dengan DED drainase secara bertahap.

c. Prosedur

Dalam pembangunan di butuhkan prosedur yang sesuai sehingga di dalam perencanaan tidak terjadi ke salahan, maka Dinas perumahan permukiman dan Cipta Karya dalam perencanaan pembangunan menggunakan prosedur awal yaitu prosedur yang ada di dalam master plan sehingga dalam perencanaan bisa berjalan dengan baik.

d. Program

Program yang ada berdasarkan master plan,sebelum di lakukan perencana yang di buat oleh dinas makan dinas harus surve di lapangan terlebih dahulu sehingga rencana pembuatan drainase sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan yang baik akan mempengaruhi hasil atau pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian dalam tanggung jawab kerja dalam hal

pembangunan penataan drainase perkotaan di kota pekanbaru sudah jelas dan terarah dengan adanya (Tufoksi) Tugas Pokok Dan Fungsi dari dinas Perumahan Permukiman dan Cipta Karya Hal ini dapat dilihat dari adanya struktur organisasi dinas yang ada di Kantor Dinas Perumahan Permukiman dan Cipta karya.

a. Penempatan tugas dan fungsi

Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian bagi masing-masing, sehingga pembagian pekerjaan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Penetapan tugas yang ada di dinas sudah jelas sesuai setiap anggota, dan pemetapaan tugas yang ada di dinas sudah jelas sesuai setiap anggota dinas sudah mengetahui dan mengerti tugasnya masing-masing, bahwa pengorganisasian dilakukan agar setiap pegawai tau dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dengan penempatan dan pembagian tugas yang sesuai dengan keahliannya dan kemampuannya dengan begitu tujuan dapat tercapai secara maksimal.

b. Penetapan wewenang

Didalam sebuah organisasi sangat di butuhkan wewenang atau hak melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan suatu kegiatan agar tercapai tujuan tertentu.

penetapan wewenang yang ada di dinas sudah jelas sesuai dengan wewenang dalam melaksanakan tugasnya. Setiap anggota dinas yang di kasi wewenang mengetahui dan mengerti tugasnya masing-masing, dan pegawai yang menangani maslah drainase ini sudah di pilih sesuai dengan ke ahliannya supaya bisa



bekerja dengan baik dan tidak terjadi berantakan nantinya.

c. Tanggung Jawab

Dinas Perumahan Permukiman dan Cipta Karya setiap pegawai mempunyai tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan pembangunan drainase di Kota Pekanbaru. Dinas Perumahan Permukiman dan Cipta Karya mempunyai tim tersendiri untuk mengawasi pelaksanaan penataan drainase di lapangan dan 1 tim konsultan pengawas yang gunanya untuk mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan.

3. Directing

Directing adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau intruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

a. Bimbingan

Dinas Perumahan Permukiman dan Cipta Karya setiap pegawai di bimbing untuk giat bekerja dan harus bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi baik di lapangan maupun di kantor.

b. Saran

Dinas Perumahan Permukiman dan Cipta Karya Kepala Dinas selalu memberi saran kepada bawahan agar segala sesuatu harus di laporkan ke pada atasan agar tidak terjadi kesalahan dalam berkerja di lapangan.

c. Perintah

Dinas Perumahan Permukiman dan Cipta Karya Kepala Dinas selalu memberi perintah kepada kepala bagian untuk di sampaikan kepada

bawahanya agar segala sesuatu yang harus di kerjakan sesuai dengan apa yang di perintahkan oleh atasan sehingga tidak terjadi kesalahan.

4. Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

a. Menetapkan Alat Ukur

Dinas Perumahan Permukiman dan Cipta Karya dalam pembangunan drainase adalah dengan menggunakan tipikal drainase yang dimana dalam pembuatan drainase harus disesuaikan dengan lingkungan setempat yang ingin dibangun drainase. Pengawasan dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan dengan melihat pembangunan drainase yang sedang berjalan. Pengawasan yang baik diharapkan agar dapat mengurangi penyimpangan yang terjadi.

b. Mengendalikan Penilaian

Penilaian terhadap pekerjaan yang telah dilakukan guna untuk mengetahui penyimpangan yang telah terjadi terhadap standar yang telah di tetapkan oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Cipta Karya. Penilaian pekerjaan yang telah dilakukan juga bermanfaat untuk menentukan langkah apa yang akan diambil untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang sama.

Standar drainase yang di gunakan menguanaka sistem tipikal dan pengawasan di lakukan secara langsung dengan terjun kelapangan

supata tidak terjadi penyimpangan di lapangan.

c. Mengadakan tindakan perbaikan

Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan, maka pertama-tama haruslah dianalisis apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan. Bila pimpinan sudah dapat menetapkan dengan pasti apa sebab terjadinya penyimpangan barulah diambil tindakan perbaikan.

Apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan maka di perlukan tindakan perbaikan yang dilakukan dengan cara tindakan yang dilakukan oleh pelaksana pembangunan untuk mengetahui bahwa pelaksanaan atau hasil program tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan dapat diketahui atau dapat ditanggulangi.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manaejemen perkotaan di Pekanbaru, yaitu:

1. Anggaran

Anggaran merupakan rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan, karena anggaran di sini sangat berpengaruh pada hasil kerja dinas tersebut untuk dapat dinikmati masyarakat.

Dalam satu tahun anggaran yang di butuhkan seharusnya 3 milyar namun anggaran terbatas, jadi pihak dinas Perumahan Permukiman dan Cipta Karya menyesuaikan saja dengan kondisi yang ada di anggaran dengan yang ada di lapangan.

2. Partisipasi

Dalam melaksanakan pembangunan maka sangat di perlukan partisipasi karena dengan adanya partisipasi sangat berperan

penting dalam membangun sebuah pembangunan yang akan di bangun. Selain partisipasi kondisi alam dan masyarakat sangat berpengaruh dalam berlangsungnya pelaksanaan di lapangan.

Sampai saat sekarang masih banyaknya wilayah di kota pekanbaru belum adanya drainase, selain itu juga masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung program pemerintah untuk pembangunan drainase.

3. Infrastruktur

Infrastruktur adalah sarana yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat dan memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi, sosial budaya dan kesatuan yang mengikat dan menghubungkan antara daerah dengan daerah lainnya.

Kondisi dilapangan atau kondisi masyarakat yang masih belum mendukung sepenuhnya terhadap pembangunan yang ada sehingga memperlambat pembangunan drainase.

4. Koordinasi

Koordinasi yang terjadi antara Dinas dengan pihak masyarakat berkurang karena masih adanya masyarakat yang tidak mau melepas tanahnya untuk pembanguna drainase. Oleh karena itu dibutuhkan pemimpin yang tegas dan andil dalam pelaksanaan di lapangan dan bisa mempertegas bawahanya untuk berkoordinasi yang baik dengan masyarakatserta dinas terkait supaya tidak ada terjadi permasalahan dalam pembangunan drainase.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dalam manajemen perkotaan pada drainase kota Pekanbaru dapat disimpulkan :
  - a. Perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Permukiman Dan Cipta Karya yang mana berpedoman kepada standar drainase lingkungan dengan memiliki tujuan untuk menata serta memperbaiki kualitas lingkungan, tetapi pada kenyataannya dalam melaksanakan perencanaan itu sendiri masih terdapatnya kendala-kendala yang ditemui dilapangan. sedangkan kebijakan, prosedur dan program pada Master Plan secara keseluruhan belum ada yang mengatur tentang drainase di Kota Pekanbaru hanya saja Master Plan secara bertahap yang di laksanakan atau DED Drainase.
  - b. Dalam penetapan tugas, fungsi telah dilakukan oleh Dinas Perumahan Permukiman Dan Cipta Karya sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing tetapi dalam pembagian wewenang kepada bawahan dianggap sudah bisa bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.
  - c. Directing yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Permukiman Dan Cipta Karya dalam memberikan saran dan pembinaan sering dilakukan setiap minggunya

tetapi masih adanya terjadi miskomunikasi serta belum maksimalnya koordinasi antara dinas dengan pekerja lapangan tetapi dalam perintah atau instruksi telah dilakukan sesuai dengan prosesnya atau prosedurnya.

- d. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Permukiman Dan Cipta Karya terjun langsung kelapangan, baik dari segi perencanaan, pelaksanaanya dan hasil nantinya, tetapi masih ada terjadinya penyimpangan atau kendala dilapangan maka dilakukan dan dicari solusi, tindakan serta penyelesaiannya.
2. Faktor yang mempengaruhi keberlangsungan kerja dinas dalam permasalahan penataan drainase yang membuat hasil kerja tidak terlihat maksimal mungkin, yaitu anggaran yang menjadi kendala bahwa dana yang diberikan tidak secara langsung tetapi secara bertahap dengan keuangan daerah yang mengakibatkan penataan drainasenya sendiri juga bertahap, masih banyaknya masyarakat yang kurang mendukung dalam pembangunan dan berpartisipasi untuk melepaskan lahannya demi pembuatan drainase, kondisi alam dan koordinasi.

### **B. Saran**

1. Diharapkan untuk manajemen drainase perkotaan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Cipta Karya kota

Pekanbaru agar dapat dilakukan semaksimal mungkin karena drainase itu sendiri merupakan suatu hal terpenting dalam lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat, serta dihaapkan dalam proses penataan dan pembangunan drainase ini harus memiliki Master Plan secara kelesuruhan supaya mempermudah pembangunan serta penataan drainase demi terciptanya kehidupan dan lingkungan yang sehat.

2. Diharapkan dalam penataan dan pembangunan drainase ini didukung oleh sumber daya yang ada seperti dana atau anggaran dan juga manusianya, dengan adanya sumber daya tersebut semua perencanaan yang telah disusun dapat terimplementasi dengan baik serta juga dibutuhkan pendekatan dari pemerintah kota dengan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam melakukan penataan dan pembangunan drainase ini dengan menyerahkan atau menghibahkan sebagian tanah mereka untuk pembangunan drainase agar tidak terjadinya bencana yang disebabkan oleh mereka sendiri dan dapat hidup dengan sehat dan lingkungan yang bersih.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hasibun, Melayu, 2004. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Handoko, T. Hani. 2001. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Edisi kedua Yogyakarta; BPFE. Yogyakarta.
- Hasibuan, H. Malayu. 2005. *Manajemen*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Handoko, 2000, *Manajemen*, Jakarta : Sukakarya
- H.R. Siswanto, 2005, *Pengantar Manajemen*, Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta.
- Indrajit, 2004, *Analisis dan Perencanaan Sistem Birokrasi Objek*. Bandung : Informatika.
- Jogianto, 2005, *Model Kesuksesan : Sistem Teknologi Informasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Kasim, Iskandar, 2005. *Manajemen Perubahan*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Manullang, 2008, *Dasar-Dasar manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Manullang, 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. UGM : Yogyakarta.
- Siagian, Sondang P. 2001. *Administrasi Pembangunan Konsep Dimensi dan Strateginya*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Siswanto, HB. Dr. 2007. *Pengantar manajemen*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Suwadi. 2008. *Memahami Penelitian kualitatif*. Jakarta : Renika Cipta.
- Syafie, Inu Kencana, 2004, *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta : Perca

- Syafiie, Inu Kencana, 2006, *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rinake Cipta
- Terry G.R. 006. *Dasar-Dasar Manajemen*. PT. Renika Cipta. Jakarta.
- Winardi, 2006, *Asas – Asas Menejemen*, P.T. Alumni, Bandung.
- Yahya, Yohannes, 2006, *Pengantar Manajemen*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

#### **Internet :**

- Administrator. 2009. *Drainase*. [online]. Tersedia: <http://one.indoskripsi.com/node/6063>. [22 Oktober 2014].
- Administrator. 2010. *Sejarah Drainase*. [online]. Tersedia: <http://kmit.faperta.ugm.ac.id/2010/03/25/sejarah-drainase/>. [22 Oktober 2014].
- Azwaruddin. 2008. *Pemahaman Umum Drainase*. [online]. Tersedia: <http://azwaruddin.blogspot.com/2008/05/pemahaman-umum-drainase.html>. [22 juli 2015].
- Tata Ruang Air, Oleh: Robert J. Kodoatie & Roestam Sjarief, Penerbit: C.V Andi Offset: <http://rathocivil02.wordpress.com/2007/12/23/tugas-drainase/>. [Di unduh juli 2015].
- Jenis Drainase dan Permasalahanya*. [online]. Tersedia: <http://rathocivil02.wordpress.com/2007/12/23/tugas-drainase/>. [9 juli 2015].

#### **Dokumen :**

Dokumen Review Master Plan Tahap II pada Dinas Perumahan Permukiman dan Cipta Karya

#### **Peraturan perundang – undangan :**

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Pekotaan